



## Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

Linda Ika Wahyuntari<sup>1✉</sup>, Amin Pujiati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Bank Nasional Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Juni 2016

Disetujui Juli 2016

Dipublikasikan Agustus 2016

*Keywords:*

*Disparity, Agglomeration, Equalization Funds, HDI, Typology Klassen, GLS.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, menganalisis pengaruh aglomerasi industri, dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Tipologi Klassen dan analisis regresi data panel dengan metode *Generalized Least Square (GLS)*. Hasil identifikasi kabupaten/ kota yang konsisten berada di klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh dalam kurun waktu tahun 2009-2013, yaitu Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat dan cepat tumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

### Abstract

*This study aims to identify the classification of the area fast forward and fast-growing, analyze the effect of industrial agglomeration, the balance funds, HDI, and area classification fast forward and fast-growing against the disparity of development districts/ cities in Central Java province. This research using descriptive analysis Typology Klassen and panel data regression analysis with the method of Generalized Least Square (GLS). The results of the identification of districts/ cities that are in the area classification consistently fast forward and fast-growing in the period 2009-2013, namely Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta and Kota Semarang. The results of this study indicate that the industrial agglomeration effect on positive and significant, while the balance funds, HDI, and the classification of fast and fast-growing regions a significant negative effect on the development disparity districts/ cities in Central Java province.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Jalan MT. Haryono No. 16, Purwodinatan, Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50122  
E-mail: lindaika12@gmail.com

ISSN 2252-6765

## PENDAHULUAN

Pembangunan dalam lingkup spasial memang tidak selalu merata, disparitas (ketimpangan) pembangunan antar wilayah seringkali menjadi masalah yang krusial bagi pembangunan daerah. Adanya disparitas antar wilayah menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pembangunan dan tingkat kesejahteraan yang menciptakan beberapa wilayah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa wilayah lain mengalami pertumbuhan lambat. Disparitas wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. (Chen, 2010) mengungkapkan kesenjangan antar daerah dalam output per kapita dan pendapatan di Cina besar dan terus-

menerus. Hal ini dilatarbelakangi daerah memiliki perbedaan karakteristik seperti perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, terpusatnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah (aglomerasi), dan disertai kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Selain itu juga disebabkan dari sumber daya manusianya, pertumbuhan ekonomi bisa maju bersama dengan tenaga kerja terdidik (Shindo, 2010). Perbedaan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perbedaan proses pembangunan, sehingga akan menciptakan wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2014:107).

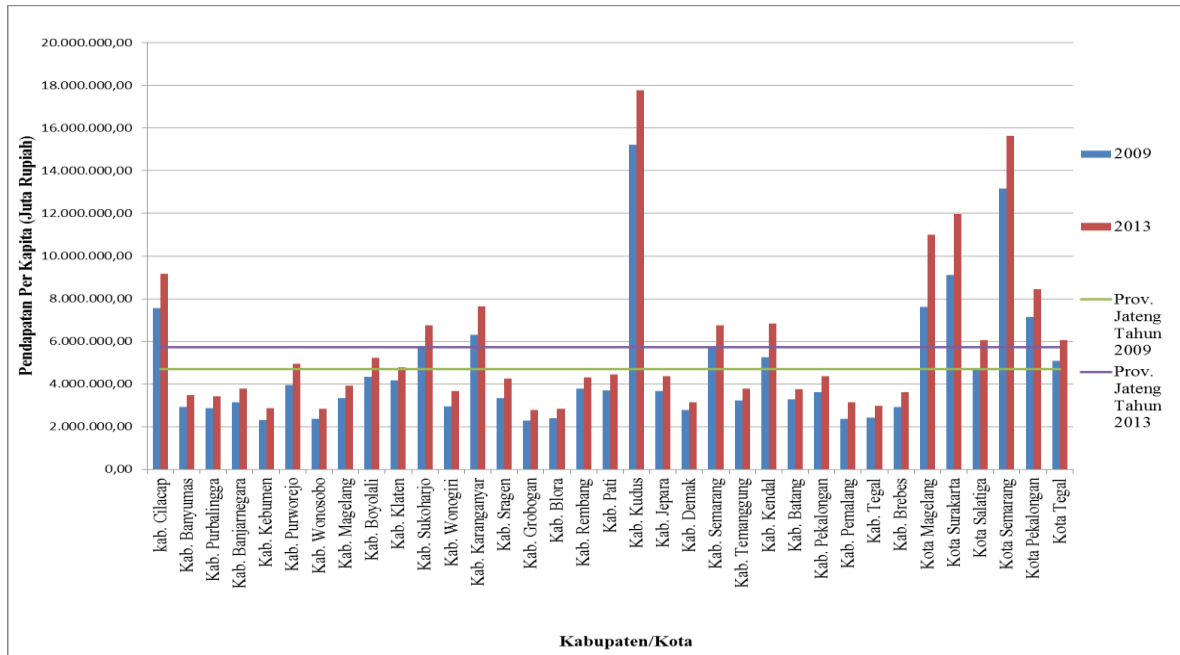
**Tabel 1.** Perbedaan Laju Pertumbuhan PDRB dan Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2013

Provinsi	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)	Peringkat	Indeks Williamson	Peringkat
DKI Jakarta	6,18	2	0,89	1
Jawa Barat	5,85	3	0,14	3
<b>Jawa Tengah</b>	<b>5,83</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>	<b>2</b>
DIY	5,04	6	0,05	5
Jawa Timur	6,55	1	0,02	6
Banten	5,84	4	0,10	4

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1 Provinsi Jawa Tengah menempati Indeks Williamson peringkat kedua sebesar 0,21. Tingginya nilai disparitas Provinsi Jawa Tengah mengalahkan Provinsi Jawa Timur yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Pulau Jawa periode tahun 2009-2013. Jika dibandingkan, Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki laju pertumbuhan PDRB peringkat kelima sedangkan laju pertumbuhan PDRB peringkat pertama diperoleh Provinsi Jawa Timur, namun Provinsi Jawa Timur memiliki Indeks Williamson terendah yaitu sebesar 0,02.

Rendahnya nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur dengan laju pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah memiliki distribusi pendapatan antar kabupaten/ kota yang merata. Fenomena disparitas yang terjadi di provinsi Jawa Tengah menjadi menarik untuk diteliti, karena perbandingan antara laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang cenderung rendah hanya menempati peringkat kedua terendah, namun memiliki nilai Indeks Williamson cenderung tinggi yang menempati peringkat kedua tertinggi dari seluruh provinsi di Pulau Jawa.



**Gambar 1.** PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tanpa Migas

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar wilayah. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap unsur penting dari ekonomi yang sehat (Modis, 2013). PDRB per kapita yang semakin besar mendeskripsikan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik, dan bila PDRB per kapita semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk kesejahteraan di daerah tersebut. Berdasarkan Gambar 1, terlihat perkembangan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 tanpa migas tahun 2009 dan tahun 2013 menunjukkan adanya tren yang positif namun relatif kecil. Dibuktikan pada tahun 2009 dan 2013 hanya 12 kabupaten/ kota yang memiliki PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2009 dan 2013, Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tertinggi dan di atas PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 15,23 juta dan Rp. 17,76 juta. Sedangkan kabupaten yang memiliki PDRB per kapita

terendah dan di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2,3 juta dan Rp. 2,8 juta..

Ketidakmerataan dapat dipengaruhi adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah maju dan daerah tertinggal, hal ini dapat dilihat dengan klasifikasi daerah. Diharapkan daerah-daerah cepat maju dan cepat tumbuh ini dapat memberikan dampak sebar ke daerah sekitarnya (daerah tertinggal), sehingga mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, daerah maju ini juga akan menyebabkan disparitas antar wilayah, jika terjadi penyerapan ekonomi dari wilayah sekitarnya yang tertinggal ke wilayah maju tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik meneliti kabupaten/ kota yang menjadi daerah cepat maju dan cepat tumbuh di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas tersebut di antaranya faktor aglomerasi industri, dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian menggunakan data-data yang berupa angka yang kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Tipologi Klassen dan Eviews 8. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan data runtun waktu (*time series*) yang merupakan data tahunan, dimulai pada tahun 2009 - 2013, dan data silang tempat (*cross section*) yang terdiri dari 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dan sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah disparitas pembangunan, aglomerasi industri, dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh tahun 2009-2013. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data disparitas pembangunan diperoleh dari perhitungan Indeks Williamson, aglomerasi industri dengan perhitungan Indeks Balassa, dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh ditentukan melalui Tipologi Klassen. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan analisis statistik. Analisis statistik meliputi regresi data panel (uji Chow dan uji Hausman), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji hipotesis (uji F dan uji t), koefisien determinasi.

### Metode Analisis Data

$$DISP_{it} = \beta_0 + \beta_1 AGIND_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 DKD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

DISP	= Disparitas Pembangunan
AGIND	= Aglomerasi Industri
DP	= Rasio Dana Perimbangan
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
DKD	= Klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh
$\beta_0$	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
$\varepsilon_{it}$	= Komponen error di waktu t untuk unit cross section i

i	=Menunjukkan unit kabupaten/kota (1,...,35)
t	= Menunjukkan periode waktu (2009-2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Klasifikasi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh

Berdasarkan penelitian dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013, perkembangan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah belum dapat mendeskripsikan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/ kota, hal ini diketahui dari jumlah kabupaten/ kota yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh relatif sedikit yaitu kurang dari 50 persen dari keseluruhan kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/ kota. Hanya beberapa kabupaten/ kota yang konsisten memperoleh laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2009-2013, yaitu Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Kabupaten/ kota yang konsisten termasuk klasifikasi bukan daerah cepat maju dan cepat tumbuh dalam kurun waktu 2009 – 2013 yaitu di antaranya: berada di klasifikasi daerah maju tetapi tertekan adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Kudus, berada di klasifikasi daerah berkembang cepat adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Sragen, dan daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Pekalongan.

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk pemilihan model regresi data panel (*Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*) yang sesuai pendugaan digunakan uji Chow.

**Tabel 2.** Hasil Uji Chow

<b>Redundant Fixed Effects Tests</b>			
Pool: DISPARITAS			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2919.589497	(34,136)	0.0000

Taraf signifikansi :  $\alpha = 5\%$

Sumber : data diolah (eviews 8)

Nilai signifikansi dilihat dari nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak maka dapat disimpulkan model data panel yang digunakan untuk menghasilkan estimasi paling baik dalam mengestimasi pengaruh aglomerasi industri, dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat

maju dan cepat tumbuh terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 adalah model *fixed effect*. Selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk memilih model terbaik diantara *fixed effect* dan *random effect* menggunakan uji *Hausman*.

**Tabel 3.** Uji Hausman

<b>Correlated Random Effects-Hausman Tests</b>			
Pool: Untitled			
Tests cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.766670	4	0.0672

Tingkat signifikansi :  $\alpha = 5\%$

Sumber : data diolah (eviews 8)

Nilai signifikansi dilihat dari nilai probabilitas sebesar  $0,0672 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima yang berarti menolak model *fixed effect*. Dengan demikian, pengambilan keputusan model terbaik yang digunakan adalah *random effect model*. Berdasarkan perbandingan *goodness of fit* dari masing-masing model (Tabel 4), sebagai indikator ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya, maka model terbaik yang dipilih yaitu *fixed effect model*. Selain itu landasan digunakan *fixed effect model* karena pertimbangan teoritis, jika dampak dari gangguan diasumsikan bersifat acak maka dipilih REM, sebaliknya dampak dari gangguan diasumsikan mempunyai pengaruh tetap (dianggap sebagai bagian dari intersep) dipilih FEM.

Metode penaksiran model yang dipakai adalah *Generalized Least Square* (GLS). Metode GLS dipilih dalam penelitian ini karena adanya nilai lebih yang dimiliki oleh GLS dibandingkan OLS dalam mengestimasi parameter regresi. Gujarati (2013:471-474) mengatakan bahwa metode OLS yang umum tidak mengasumsikan bahwa varians variabel adalah heterogen, pada realitanya variasi data pada data *pooling* cenderung heterogen. Metode GLS sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independen secara eksplisit sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Dependen Variabel :	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta (C)	0,303366 (9,693523)**	0,095123 (11,39020)**	0,130952 (3,204079)**
Aglomerasi Industri (AGIND)	-0,000788 (-1,182664)	0,002284 (3,412534)**	0,003499 (1,760437)
Dana Perimbangan (DP)	-0,075799 (-6,347151)**	-0,008600 (-4,061349)**	-0,013145 (-2,775477)**
IPM (IPM)	-0,002571 (-6,454524)**	-0,000219 (2,124265)*	-0,000683 (-1,360138)
Klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh (DKD)	0,036467 (11,49731)**	-0,000829 (-2,496792)**	-0,001165 (-0,883545)
R <sup>2</sup>	0,188316	0,998802	0,060263
Adj R <sup>2</sup>	0,169218	0,998467	0,038151
F	9,860289	2982,644	2,725409
Prob F	0,000000	0,000000	0,031079
Durbin Watson	0,526751	1,606583	0,966495

Sumber: Hasil output Eviews 8

Catatan: \* signifikan  $\alpha = 5\%$ , \*\* signifikan  $\alpha = 1\%$ 

Angka dalam kurung menunjukkan nilai t-statistik

**Hasil uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan uji normalitas di atas, nilai probabilitas sebesar 0,683497 menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $> \alpha=5\%$ . Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil output diketahui semua koefisien korelasi diantara masing-masing variabel kurang dari 0,8, maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari masalah multikolinieritas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinieritas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8, maka model bebas dari masalah multikolinieritas (Gujarati, 2013:428).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode

*Generalized Least Squares* (GLS) yang pada intinya memberikan pembobotan variasi data yang digunakan, dengan kuadrat varians dari model. Penelitian ini menggunakan *cross section weight* dan *White Heteroscedasticity Covarians*, sehingga masalah heteroskedastisitas sudah dapat di atasi (Gujarati, 2013:477).

Berdasarkan hasil penelitian model *fixed effect* diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,606583. Berdasarkan uji *Durbin Watson* diketahui nilai  $d_L$  dan  $d_U$  dengan jumlah variabel bebas 4 dan  $n$  175 adalah:  $d_L$  (1,7062),  $d_U$  (1,7996),  $4-d_U$  (2,2004), dan  $4-d_L$  (2,2938). Maka pengambilan keputusannya adalah adanya autokorelasi positif dalam model. Menurut Gujarati (2012:43) untuk permasalahan autokorelasi dapat di atasi dengan metode GLS (*Generalized Least Square*), penggunaan metode GLS dapat menekan autokorelasi yang biasanya

timbul dalam metode OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai akibat kesalahan estimasi varians sehingga dengan metode GLS masalah autokorelasi sudah dapat di atasi.

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Nilai koefisien regresi variabel aglomerasi industri mempunyai tanda parameter positif yakni sebesar 0,002284 dengan probabilitas sebesar 0,0008 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 1\%$  (0,01). Hal ini berarti kenaikan aglomerasi industri sebesar 1 persen akan menaikkan disparitas pembangunan sebesar 0,002284 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Faiz (2011), Yeniwati (2013), Angelia (2010), Boinet (2006), dan Uzantha (2011).

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada wilayah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan akan menyebabkan perpindahan tenaga kerja dari wilayah dengan aglomerasi industri rendah ke wilayah dengan aglomerasi tinggi. Daerah yang memiliki tingkat aglomerasi industri yang cenderung rendah atau bahkan tidak terjadi aglomerasi berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam pendapatan sektor industri yang berpengaruh pada PDRB ataupun PDRB per kapita dan mengakibatkan daerah tersebut akan menjadi daerah tertinggal.

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Nilai koefisien regresi variabel dana

perimbangan memiliki tanda parameter negatif sebesar -0,008600 dengan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar  $\alpha=1\%$  (0,01). Hal ini berarti kenaikan dana perimbangan sebesar 1 persen akan menurunkan disparitas pembangunan sebesar 0,008600 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Arafia (2012) menyatakan apabila Provinsi DKI Jakarta tidak diikutsertakan maka kesenjangan menurun dan hubungan antara dana perimbangan dengan kesenjangan antar wilayah di Indonesia menjadi kuat.

Nilai koefisien variabel dana perimbangan dalam penelitian ini terbesar dalam menurunkan disparitas pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan begitu pentingnya peranan dana perimbangan dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Penurunan disparitas pembangunan tersebut dikarenakan dana perimbangan merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah di Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan sumber penerimaan daerah lainnya yaitu PAD dan lain-lain pendapatan yang sah dan juga anggaran tersebut digunakan untuk belanja pembangunan seperti industri, perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya dengan cara memperbaiki infrastruktur publik yang ada, yaitu sarana kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan, sehingga mengoptimalkan peningkatan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Nilai koefisien regresi variabel IPM mempunyai tanda parameter negatif yakni sebesar -0,000219 dengan probabilitas sebesar 0,0355 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar  $\alpha=5\%$  (0,05). Hal ini berarti kenaikan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan disparitas pembangunan sebesar 0,000219 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nurhuda (2012), yang menyatakan bahwa IPM yang semakin tinggi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien IPM terkecil dalam menurunkan disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan produksinya. Produktivitas tersebut ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik. Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain IPM memiliki peran penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan mengurangi disparitas pembangunan. Rendahnya kontribusi IPM dalam menurunkan disparitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dilatarbelakangi rendahnya pembangunan manusia yang dicerminkan oleh rendahnya taraf kesehatan dan pendidikan, disebabkan oleh keterbatasan perekonomian penduduk atau daya beli masyarakat yang rendah.

Hasil estimasi klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh menunjukkan hasil negatif dan signifikan pada derajat kepercayaan  $\alpha=5\%$  (0,05). Nilai koefisien klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh negatif dan signifikan menunjukkan adanya perbedaan disparitas pembangunan daerah cepat maju dan cepat tumbuh dengan bukan daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah maju tetapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal berdasarkan klasifikasi daerah dengan Tipologi Klassen. Hasil ini didukung dengan teori kutub pertumbuhan dari Perroux dalam Arsyad (1999:147-148), bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama dan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Adanya pusat pertumbuhan ekonomi berimplikasi terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu, bagaimana hasil produksi dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut, dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berada di daerah sekitar pusat pertumbuhan (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Oleh karena wilayah yang sebagai pusat pertumbuhan tersebut dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi daerah sekitar. Perbedaan tingkat pembangunan ini membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan disparitas antar wilayah semakin besar. Beberapa wilayah yang mampu menciptakan kutub-kutub pertumbuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain, memberikan efek stimulus kehidupan ekonomi yang dinamis hanya terjadi di beberapa wilayah tersebut, sedangkan di wilayah yang hanya memiliki kutub pertumbuhan yang jumlahnya sedikit, juga mengalami stimulus kehidupan ekonomi tetapi tidak setinggi di wilayah yang memiliki kutub pertumbuhan. Maka pemerintah daerah khususnya pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang berorientasi pada peningkatan integrasi dan interkoneksi seluruh wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh aglomerasi industri, dana perimbangan, IPM, dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dapat diambil simpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tahun 2009-2013, ditemukan adanya sejumlah kabupaten/ kota yang konsisten berada dalam suatu klasifikasi. Adapun kabupaten/ kota yang konsisten berada di klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh



adalah Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan lain dari penelitian ini mendukung teori kutub pertumbuhan yang menjelaskan pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama dan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pertumbuhan kutub (pusat) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan disparitas pembangunan antar wilayah yang ditunjukkan dengan hasil estimasi klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh berpengaruh signifikan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: (1) Perlu adanya evaluasi fasilitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur jalan yang sudah disediakan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi fasilitas tersebut dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, investor, dan masyarakat bekerja sama dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur jalan demi tercapainya kelancaran aktivitas ekonomi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. (2) IPM berdasarkan hasil penelitian koefisiennya kecil, sehingga perlu adanya peningkatan IPM melalui optimalisasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun indeks pendapatan memiliki nilai yang paling kecil dalam kontribusi nilai IPM menunjukkan pembangunan di bidang ekonomi belum optimal. Kebijakan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang harus dilakukan, yaitu memperluas lapangan pekerjaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mempermudah masyarakat memperoleh kredit usaha yang disertai dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui lembaga pendidikan seperti beasiswa bagi siswa

yang berprestasi dan tidak mampu, dan tidak mengesampingkan peningkatan kesehatan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faiz, Asman. 2011. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, dan Panjang Jalan terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen pada 25 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008. Semarang: *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Angelia, Yuki. 2010. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. Semarang: *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Arafia, Diantha. 2012. Dampak Dana Perimbangan pada Era Desentralisasi terhadap Kesenjangan Antar wilayah di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK*.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik . 2009-2014. Jawa Tengah dalam Angka. Semarang: BPS.
- Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities Evidence from The Colombian Experience. *Original Paper*. Ann Reg Sci 40:661-676.
- Chen, A., 2010. Reducing China's regional disparities: Is there a growth cost? *China Economic Review* , 21, pp.2-13.
- Gudjarati, Damodar dan Porter, Dawn. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati.2013.Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumantoro, -. (2012). Disparitas Dan Spesialisasi Industri Manufaktur Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 2(2).
- Modis, T., 2013. Long-term GDP forecasts and the prospects for growth. *Technological Forecasting & Social Change* , 80, pp.1557–62.
- Nurhuda, Rama. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1, No. 4, Hal. 110-119.
- Shindo, Y., 2010. The effect of education subsidies on regional economic growth and disparities in China. *Economic Modelling* , 27, pp.1061–68.

- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, D. (2015). Pengembangan Daerah Berdasarkan Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sektor Di Wilayah Kedung Sepur. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Uzantha, Sylvenky Pryco. 2011. *Analisa Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat*. Padang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia
- Widodo, Adi, Waridin, Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No.1, Juni 2011. Hal 25-42.
- Yeniwati. 2013. "Ketimpangan Ekonomi antar Provinsi di Sumatera". *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol.2, No.3, Hal. 1-21.
- Yuliani, T., & Saragih, N. (2014). Determinan Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(1),60-72.